



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, Agustus 2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Daftar Tabel.....	2
BAB. I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat	40
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	42
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	44
3.3. Program dan Kegiatan.....	44
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	50
BAB. IV PENUTUP	58
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Tengah	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	21
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah	30
Tabel 2.5	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	41
Tabel 3.3	Rumusan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	46
Tabel 4.1	Rumusan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	51

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.

Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik/masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- c. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;

- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk **tahun n** dan **tahun n+1**.

Penyusunan program kegiatan pada tahun 2023 ini berpedoman pada RPJMD 2021-2026 Provinsi Kalimantan Tengah dan RENSTRA Perangkat Daerah 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, dengan sasaran pokok dan kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2020, serta memperhatikan RPJMN 2020-2024.

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan RENSTRA Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, RENSTRA Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD.

I.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Perangkat Daerah ini, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 90);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. Mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2023 melalui perencanaan kinerja tahunan.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai bidang urusan perangkat daerah di tahun 2023.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2023;

2. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2023 yang hasilnya akan dituangkan dalam Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Pemerintahan Umum) dan laporan kinerja.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3.3. Program Dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah dilakukan pemetaan terhadap program dan kegiatan yang telah disusun/disesuaikan dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka penyesuaian/ sinkronisasi program dan kegiatan yang ada.

Sejumlah program dan kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan sudah terpetakan dengan baik, serta sudah memperoleh hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

2.1.1 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA Perangkat Daerah dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Realisasi Kinerja program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 sebesar 59 % mempunyai implikasi atau berdampak kurang baik terhadap pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan akhir tahun 2021, hasil capaian RENSTRA Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 91 %.

2.1.2 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Penyusunan program kegiatan yang bersifat kelanjutan/berkesinambungan dari tahun sebelumnya mengacu pada program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2019 serta berpedoman pada RPJMD 2021-2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah 2021-2026.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 dan capaian RENSTRA Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 (terlampir).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		
					Target Renja SKPD 2021	Realisasi Renja SKPD 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100%	100%	20%	20%	100%	20%	100%	100%
1.05.1.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar (surat)	648	540	108	108	100%	108	648	100%
1.05.1.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar (rekening)	36	30	6	6	100%	6	36	100%
1.05.1.05.01.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah polis asuransi yang dibayar (polis)	6	5	1	0	0%	1	6	100%
1.05.1.05.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional (unit)	84	70	14	14	100%	14	84	100%
1.05.1.05.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola uang dan barang serta tim pengadaan barang dan jasa (orang)	240	205	45	45	100%	40	245	102%
1.05.1.05.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor (orang)	102	85	17	17	100%	17	102	100%
1.05.1.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor (jenis)	196	176	39	39	100%	39	215	110%
1.05.1.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan (lembar)	1062000	885000	177000	177000	100%	177000	1062000	100%
1.05.1.05.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen penerangan (lampu)	306	255	51	51	100%	51	306	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		
					Target Renja SKPD 2021	Realisasi Renja SKPD 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per- UU	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	36	30	6	6	100%	6	36	100%
1.05.1.05.01.01.17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan untuk rapat intern kantor, Jumlah makanan untuk tamu (kotak)	3300	2750	550	550	100%	550	3300	100%
1.05.1.05.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (kali)	72	60	12	12	100%	12	72	100%
1.05.1.05.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas kedalam daerah (kali)	162	135	27	27	100%	27	162	100%
1.05.1.05.01.01.26	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Teknis Program Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah dokumen yang diperlukan untuk monitoring, evaluasi dan pembinaan program (jenis)	72	60	12	12	100%	12	72	100%
1.05.1.05.01.01.35	Rujukan Berobat PNS	Jumlah pegawai yang terbantu untuk rujukan berobat keluar daerah (orang)	6	3	0	0	0%	0	3	50%
1.05.1.05.01.01.8	Rapat Konsultasi / Konsultasi / Rakernis	Jumlah pelaksanaan kegiatan rakor (kali)	6	5	1	1	100%	1	6	100%
1.05.1.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	100%	20%	20%	100%	20%	100%	100%
1.05.1.05.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)	102	68	17	17	100%	0	68	67%
1.05.1.05.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)	40	28	8	8	100%	0	28	70%
1.05.1.05.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara (unit)	180	150	30	30	100%	30	180	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		
					Target Renja SKPD 2021	Realisasi Renja SKPD 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara (unit)	120	100	20	20	100%	20	120	100%
1.05.1.05.01.02.50	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah ruangan kantor yang direhab (ruangan)	12	8	6	6	100%	0	8	67%
1.05.1.05.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	100%	80%	20%	20%	100%	0%	80%	80%
1.05.1.05.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (stel)	720	480	120	120	100%	0	480	67%
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian yang diadakan (stel)	360	60	60	60	100%	0	60	17%
	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah pakaian yang diadakan (stel)	360	60	0	0	0%	0	60	17%
1.05.1.05.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	100%	60%	0%	0%	0%	0%	60%	60%
1.05.1.05.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan kursus (orang)	90	60	0	0	0%	0	60	67%
1.05.1.05.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan dan kesesuaian laporan capaian kinerja dan laporan keuangan (%)	100%	100%	20%	20%	100%	20%	100%	100%
1.05.1.05.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran (laporan)	12	10	2	2	100%	2	12	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		
					Target Renja SKPD 2021	Realisasi Renja SKPD 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (laporan)	6	5	1	1	100%	1	6	100%
1.19.1.19.01.06.05	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen RENSTRA (dokumen)	1	1	0	0	0%	0	1	100%
1.19.1.19.01.06.06	Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA (dokumen)	12	10	2	2	100%	2	12	100%
1.05.1.05.01.06.14	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP (laporan)	6	5	1	1	100%	1	6	100%
1.19.1.19.01.06.15	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen RENJA (dokumen)	12	10	2	2	100%	2	12	100%
1.19.1.19.01.06.33	Penyusunan laporan TEPPRA	Jumlah laporan TEPPA/SIMPPD (laporan)	126	87	12	0	0%	12	99	79%
1.19.1.19.01.06.35	Penyusunan laporan LKPJ dan LPPD	Jumlah laporan LKPJ dan LPPD (laporan)	12	10	2	2	100%	2	12	100%
1.19.1.19.01.06.42	Penyusunan Rencana serta Program kegiatan	Jumlah dokumen rencana program serta program kegiatan (dokumen)	6	5	1	1	100%	1	6	100%
1.19.1.19.01.08	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH	Persentase peningkatan pengembangan pengelolaan aset/barang milik daerah (%)	100%	100%	20%	20%	100%	20%	100%	100%
1.19.1.19.01.08.01	Pengelolaan Inventaris Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah (laporan)	30	25	5	5	100%	5	30	100%
1.19.1.19.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah peta daerah rawan konflik dari sudut pandang intelijen (peta)	5	3	0	0	0%	1	3	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		
					Target Renja SKPD 2021	Realisasi Renja SKPD 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.19.1.19.01.15.08	Identifikasi daerah rawan konflik	Jumlah laporan tentang Data Rawan Konflik di kabupaten (laporan)	48	25	0	0	0%	1	26	54%
1.19.1.19.01.15.10	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (kali)	24	44	4	4	100%	4	48	200%
1.19.1.19.01.15.20	Pelaksanaan Deteksi Dini Bagi Aparatur Kesbang	Jumlah aparatur kesbang yang mengikuti deteksi dini (kali)	200	100	0	0	0%	50	150	75%
1.19.1.19.01.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Jumlah kegiatan kerjasama pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal (kegiatan)	60	60	10	10	100%	10	60	100%
1.19.1.19.01.16.02	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan aparat keamanan (kali)	60	40	10	10	100%	0	40	67%
1.19.1.19.01.16.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan situasi daerah dari kab/kota se-Kalteng (laporan)	1008	840	168	168	100%	168	1008	100%
1.19.1.19.01.16.06	Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan orang asing (laporan)	72	60	12	12	100%	12	72	100%
1.19.1.19.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Masyarakat yang wawasan kebangsaan (orang)	10500	7400	1750	200	11%	1750	7400	70%
1.19.1.19.01.17.03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat (orang)	600	500	100	0	0%	100	600	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		
					Target Renja SKPD 2021	Realisasi Renja SKPD 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
-	Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Jumlah peserta yang mengikuti forum (orang)	600	700	200	200	100%	200	900	150%
1.19.1.19.01.17.11	Pengembangan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (laporan)	600	500	100	0	0%	100	600	100%
1.19.1.19.01.17.12	Ikrar Anak Bangsa	Jumlah peserta kegiatan Ikrar Anak Bangsa (orang)	8100	6750	1350	0	0%	1350	8100	100%
1.19.1.19.01.18.19	Sarasehan Pembauran Kebangsaan Untuk Memperkokoh Persatuan Bagi Tomas, Toga dan Todat	Jumlah peserta dari unsur tomas, toga dan todat	450	0	0	0	0%	0	0	0%
1.19.1.19.01.18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah anggota masyarakat yang memahami rasa persatuan dan kesatuan cinta tanah air dan bela negara yang kuat (orang)	10850	6050	1500	0	0%	1550	6050	56%
1.19.1.19.01.18.04	Penanaman Ideologi, Cinta Tanah Air dan Bangsa bagi Generasi Muda	Terlaksananya kegiatan Penanaman Ideologi, Cinta Tanah Air dan Bangsa bagi Generasi Muda (orang)	600	650	200	0	0%	150	800	133%
1.19.1.19.01.18.11	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran bela negara (orang)	8400	7000	1400	0	0%	1400	8400	100%
1.19.1.19.01.19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Peringkat nasional Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial (RA PKS)	10 besar	10 besar	10 besar	10 besar	100%	10 besar	10 besar	83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		
					Target Renja SKPD 2021	Realisasi Renja SKPD 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.19.1.19.01.19.06	Penanganan Gangguan Keamanan di Daerah	Jumlah laporan penanganan gangguan keamanan di daerah (Laporan)	18	15	3	3	100%	3	18	100%
1.19.1.19.01.21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia	Peringkat 10	Peringkat 13	Peringkat 14	Peringkat 5	100%	Peringkat 13	Peringkat 13	100%
1.19.1.19.01.21.03	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah peserta dari parpol yang mengikuti forum koordinasi (orang)	468	390	78	0	0%	78	468	100%
1.19.1.19.01.21.06	Peningkatan Demokratisasi	Jumlah generasi muda yang mengikuti fasilitasi pemahaman tentang demokratisasi (orang)	600	600	200	0	0%	100	700	117%
1.19.1.19.01.21.07	Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Legislatif	Jumlah peserta kegiatan kerjasama (orang)	600	500	0	0	0%	0	500	83%
1.19.1.19.01.21.08	Penyempurnaan Penguatan Kelembagaan Ormas/LSM	Jumlah peserta penguatan kelembagaan Ormas/LSM (orang)	600	300	0	0	0%	0	300	50%
1.19.1.19.01.21.09	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu di Kalimantan Tengah	Jumlah kabupaten dan kota yang melaksanakan pemilu (kabupaten/kota)	84	70	14	14	100%	14	84	100%
1.19.1.19.01.21.12	Sarasehan Peningkatan Wawasan Politik Perempuan	Jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan pertemuan dengan tokoh-tokoh politik perempuan (orang)	600	500	0	0	0%	0	500	83%
1.19.1.19.01.21.27	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Jumlah peserta kegiatan Indeks Demokrasi Indonesia (orang)	600	500	0	0	0%	100	600	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		
					Target Renja SKPD 2021	Realisasi Renja SKPD 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.19.1.19.01.23	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI	Jumlah anggota masyarakat yang memahami pentingnya pelestarian sosial budaya dan ekonomi di daerah (orang)	3600	2425	600	100	17%	425	2425	67%
1.19.1.19.01.21.01	Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)	600	400	0	0	0%	0	400	67%
1.19.1.19.01.21.02	Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya (orang)	600	300	0	0	0%	0	300	50%
1.19.1.19.01.21.04	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Dalam Rangka Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Dalam Rangka Ketahanan Sosial Budaya (orang)	600	500	0	0	0%	100	600	100%
1.19.1.19.01.21.05	Monitoring dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya se-Kalteng	Jumlah laporan monitoring dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya se-Kalteng (laporan)	6	5	1	1	0%	1	6	100%
1.19.1.19.01.21.09	Peningkatan Kepedulian Masyarakat terhadap ketahanan budaya di daerah	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap ketahanan sosial budaya di daerah (orang)	900	450	0	0	0%	0	450	50%
1.19.1.19.01.21.10	Tim pemantau dan evaluasi kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Jumlah laporan tim pemantau dan evaluasi pelestarian pengembangan budaya daerah ke provinsi lainnya (laporan)	6	3	0	0	0%	0	3	50%
1.19.1.19.01.21.11	Dialog Pembinaan Kerukunan Umat Beragama sejak usia dini	Jumlah pelajar yang mengikuti dialog pembinaan kerukunan umat beragama sejak usia dini (orang)	900	650	0	0	0%	100	750	83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		
					Target Renja SKPD 2021	Realisasi Renja SKPD 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05 . 1.05.01 . 23 . 19	Peningkatan Rasa Nasionalisme Bebas Narkoba Bagi Generasi Muda	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan rasa nasionalisme bebas narkoba bagi generasi muda	750	625	0	0	0%	125	750	100%
	Penyempurnaan Penguatan Kelembagaan Ormas/LSM	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan rasa nasionalisme bebas narkoba bagi generasi muda	400	300	100	100	100%	100	400	100%
1.19. 1.19.01. 27	PROGRAM DATA DAN INFORMASI	Peningkatan penyediaan data dan informasi (%)	100%	100%	20%	20%	100%	20%	100%	100%
1.19.1.19.01. 27.01	Ekspos Pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kegiatan yang diikuti (kegiatan)	9	8	1	1	100%	1	9	100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja pelayanan PERANGKAT DAERAH Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan acuan tersebut terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Secara ringkas kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, adalah sebagai berikut :

2.2.1 Kegiatan Pembinaan Partai Politik

Kegiatan pembinaan terhadap partai politik di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2021 yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjumlah 6 kegiatan sesuai dengan target yang tertuang di RENSTRA Perangkat Daerah yakni 6 kegiatan. Dampak rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam kegiatan pembinaan partai politik ini adalah 0 % (tidak terlaksana).

2.2.2 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Provinsi Kalimantan selama tahun 2021 dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjumlah 1 kegiatan. Sesuai dengan target yang tertuang di RENSTRA Perangkat Daerah adalah 1 kegiatan. Dampak rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam kegiatan pembinaan partai politik ini adalah 0 % (tidak terlaksana).

2.2.3 Indeks Demokrasi Indonesia

Berdasarkan skor Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur dari berbagai aspek/variable, maka untuk tahun 2019 Provinsi Kalimantan Tengah berada pada urutan ke 25 nasional. Hal ini lebih rendah dari target yang ditetapkan sebelumnya yakni peringkat 13 nasional.

Adapun metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam oleh Badan Pusat Statistik.

Dampak rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam kegiatan pembinaan partai politik ini adalah 0 % (tidak terlaksana).

2.2.4 Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pengembangan wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2021 terdiri dari berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Sesuai dengan yang tertuang di RENSTRA Perangkat Daerah, target yang ditetapkan adalah jumlah masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan sebanyak 1.750 orang.

Dampak rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam kegiatan pembinaan partai politik ini adalah 11 %. Realisasi tersebut merupakan kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dengan target sebanyak 200 orang.

2.2.5 Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, dilakukan melalui upaya kerjasama dengan aparat penegak hukum di Provinsi Kalimantan Tengah. Kerjasama berupa koordinasi ini ditargetkan sebanyak 5 kegiatan selama tahun 2021. Capaian ini berada di bawah target RENSTRA Perangkat Daerah untuk tahun 2021 sebanyak 10 kegiatan.

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.2 (terlampir).

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator	Target SPM / standar nasional	Target IKK	Target RENSTRA PERANGKAT DAERAH						Realisasi Capaian						Proyeksi 2022	Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Kesatuan Bangsa dan Politik																
1.	Pembinaan terhadap Ormas/LSM/OKP aktif (Jumlah Ormas/LSM/OKP aktif)	-	-	142	150	158	165	170	180	142	158	158	165	0	180	180	
2.	Pembinaan partai politik di Provinsi Kalimantan Tengah (Jumlah Partai Politik Provinsi)	-	-	12	12	12	16	16	16	12	12	12	16	0	16	12	
3.	Indeks Demokrasi Indonesi (IDI) di Provinsi Kalimantan Tengah (Peringkat IDI)	-	-	15	14	13	12	12	11	15	11	25	5	19	TAD	10	
4.	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (Jumlah masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan)	-	-	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	200	1750	1750	
5.	Jumlah kegiatan kerjasama pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal (Jumlah Laporan/kegiatan)	-	-	10	10	10	10	10	10	10	3	6	7	10	10	50	
6.	Kegiatan intelijen daerah dalam rangka deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum (Jumlah Laporan / kegiatan)	-	-	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sesuai telaahan dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L dan Kabupaten/Kota, Implikasi dari RT/RW dan KLHS, dapat dirumuskan isu-isu penting/strategis, sebagai berikut :

2.3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kalimantan Tengah dengan ibukotanya adalah Kota Palangka Raya terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota memiliki luas 157.983 km² dan berpenduduk sekitar 2.490.178 jiwa, yang terdiri atas 1.299.013 laki-laki dan 1.191.165 perempuan (hasil SUPAS 2015).

Dengan luasan wilayah tersebut Provinsi Kalimantan Tengah didiami berbagai macam suku bangsa dari seluruh wilayah di Indonesia. Suku asli dan dominan di Kalimantan Tengah yaitu Suku Dayak, sedangkan Suku dominan lainnya yakni suku Banjar dan Suku Jawa. Dari segi agama di Provinsi Kalimantan Tengah juga terdapat 5 agama nasional yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, serta terdapat kepercayaan lokal yakni Kaharingan yang merupakan kepercayaan penduduk asli Kalimantan Tengah.

Adanya keanekaragaman suku, budaya, agama dan partai politik serta berbagai jenis kelembagaan tersebut menjadikan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah yang cukup rawan terjadinya perselisihan antar suku dan agama serta gesekan-gesekan yang berpotensi terjadinya konflik.

2.3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.

a. Visi

Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

b. Misi

Misi Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan

Pokok misi 1, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dalam rangka menopang aktivitas ekonomi yang produktif dan kreatif;
- b) Menuntaskan infrastruktur kelistrikan melalui pemanfaatan biodiesel, tenaga surya, dan energi alternative lainnya;
- c) Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, industry kreatif, kredit usaha rakyat (KUR) melalui pendampingan, promosi, dan pemasaran produk;
- d) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berorientasi perluasan ketenagakerjaan dibidang manufaktur, termasuk pengembangan sentra industry pengolahan tapioca dan Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA);
- e) Menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan melalui penguatan sector pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, peternakan, perikanan, dan kelautan;
- f) Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan (*ecotorism*) melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan, optimalisasi promosi potensi wisata dalam Kalteng;
- g) Merawat dan melestarikan hutan rawa gambut;
- h) Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai

kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng;

2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global

Pokok misi 2, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Memfasilitasi pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan, dan pusat-pusat kebudayaan beserta penguatan tokoh lintas agama sebagai penggerak peradaban dan pilar pembentuk kemajemukan;
- b) Melakukan pendampingan terhadap Komunitas Adat untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat;
- c) Memperkuat masyarakat tahan bencana melalui mitigasi dan manajemen kebencanaan termasuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak covid-19;
- d) Mempercepat pengembangan Kawasan food estate dan penguatan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan potensi dan keunggulan local;

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

Pokok misi 3, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Membentuk birokrasi pemerintahan yang inovatif, transparan, dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi yang berdampak positif bagi kinerja aparatur dan kualitas pelayanan public (smart government);
- b) Mendorong budaya birokrasi pemerintahan yang responsive terhadap kebutuhan warga melalui pelayanan terpadu dan perluasan partisipasi public;
- c) Meningkatkan fungsi tata ruang wilayah provinsi;

- d) Menjamin kepastian hukum dan reformasi birokrasi yang berorientasi penguatan iklim investasi yang efektif dan efisien melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), menuju penyelenggaraan mall pelayanan public;
- e) Mendorong kemudahan berinvestasi melalui jaminan rasa aman, proses perijinan yang mudah dan birokrasi pemerintahan yang tangkas.
- f) Menciptakan Kalteng sebagai zona bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), narkoba, konflik dan ekstrimisme dengan memperkuat nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
- g) Memantapkan kolaborasi dan kebersamaan lintas sectoral antara pemerintah, dunia usah, dan masyarakat sipil yang berorientasi pada perwujudan Kalteng yang aman, tertib, dan Tangguh dari berbagai tantangan global;

4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing

Pokok misi 4, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
- b) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- c) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;

- d) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa;
- e) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Pokok misi 5, dirumuskan sebagai berikut :

- a) Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- b) Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- c) Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- d) Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
- e) Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

2.3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Kabupaten/Kota.

Secara hierarki Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berkoordinasi dan konsultasi baik dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

maupun dengan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Secara umum arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk tahun 2023 adalah Peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kualitas Demokrasi, berupa penanganan konflik sosial dan peningkatan kapasitas Partai Politik.

2.3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035.

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kalimantan Tengah, perlu didukung oleh terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah, sehingga Kerukunan dan Kedamaian Masyarakat akan dapat terpelihara dengan baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Tata ruang wilayah dan lingkungan hidup memiliki pengaruh terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat setempat, dengan demikian sangatlah sulit untuk merubah pola kehidupan masyarakat yang sudah mengakar dengan nilai-nilai dan norma sosial budaya masyarakat yang berbeda dengan mengandalkan sifat-sifat kedaerahannya masing-masing.

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya benturan kelompok kepentingan dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah kedepan berusaha untuk

meningkatkan Kerukunan dan kedamaian masyarakat secara efektif dan efisien.

Luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi kendala bagi pemerintah dalam memantau dan memonitor daerah-daerah tertentu yang dimungkinkan terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian setidaknya untuk memperkecil resiko konflik dalam masyarakat dapat diminimalisir dengan memberikan pendidikan politik, peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan, bela negara, pencegahan tindak kriminal, pembauran dan deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi, agama dan juga situasi pertahanan keamanan yang terus mengalami dinamika. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kalimantan Tengah dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah , sebagai berikut :

- a. Pendidikan politik masyarakat masih rendah dapat dilihat dari menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Kalimantan Tengah serta konflik-konflik yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- b. Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah, permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan, Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum (law enforcement) dan peningkatan demonstrasi yang memprotes kebijakan Pemerintah.

- c. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun dapat dilihat dari kecenderungan semakin maraknya conflict and communal violence (konflik dan kekerasan komunal) di tengah masyarakat, seperti tawuran antar warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.
- d. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan ekses-ekses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan program kegiatan pada tahun 2023 mengacu pada RPJMD 2021-2026, RENSTRA Perangkat Daerah 2021-2026, serta sasaran pokok dan kebijakan yang tertuang di dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2020. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 yang disusun ini akan menjadi bagian dari RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah tahun 2016-2021. Review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana tabel 2.4 (terlampir).

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Rancangan Awal RKPd					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Palangka Raya	Masyarakat Yang Mengerti Tentang Wawasan Kebangsaan (Orang)	200 orang	969.914,900	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Palangka Raya	Masyarakat Yang Mengerti Tentang Wawasan Kebangsaan (Orang)	200 orang	969.914.900	IKU
8,01,02,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 dokumen	969.914,900	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 dokumen	969.914.900	
8,01,02,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 dokumen	30,000,000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 dokumen	30,000,000	
8,01,02,1,01,02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 dokumen	280,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 dokumen	280,000,000	
8,01,02,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang	150,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang	150,000,000	
8,01,02,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang	100,000,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang	100,000,000	
8,01,02,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 laporan	250,000,000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 laporan	250,000,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,02,1,01,06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 dokumen	159,914,900	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 dokumen	159,914,900	
8,01,03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Palangka Raya	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka)	78,5	5.678.172.250	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Palangka Raya	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka)	78,5	5.678.172.250	IKU
8,01,03,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 dokumen	5.678.172.250	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 dokumen	5.678.172.250	
8,01,03,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	183.906.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	183.906.000	
8,01,03,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	100.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,03,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 orang	317.100.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 orang	317.100.000	
8,01,03,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 orang	4.944.207.750	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 orang	4.944.207.750	
8,01,03,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 laporan	132,958,500	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 laporan	132,958,500	
8,01,04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Palangka Raya	Capaian Pembinaan Terhadap Ormas, Lsm Dan Okp Aktif (Persen)	80%	598.514.000	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Palangka Raya	Capaian Pembinaan Terhadap Ormas, Lsm Dan Okp Aktif (Persen)	80%	598.514.000	
8,01,04,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 dokumen	598.514.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 dokumen	598.514.000	
8,01,04,1,01,01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 dokumen	100.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,04,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 dokumen	100.000.000	
8,01,04,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 orang	100.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 orang	100.000.000	
8,01,04,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 orang	198.514.000	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 orang	198.514.000	
8,01,04,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 laporan	100.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 laporan	100.000.000	
8,01,05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Palangka Raya	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	200 orang	1.062.060.250	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Palangka Raya	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	200 orang	1.062.060.250	IKU
8,01,05,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 dokumen	1.062.060.250	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 dokumen	1.062.060.250	
8,01,05,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 dokumen	100.000.000	
8,01,05,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 dokumen	100.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,05,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 orang	692.894.250	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 orang	692.894.250	
8,01,05,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 orang	100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 orang	100.000.000	
8,01,05,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 laporan	69.166.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 laporan	69.166.000	
8,01,06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Palangka Raya	Potensi Terjadinya Konflik Terkait Ipoleksosbud Yang Telah Ditangani (Persentase Kasus Yang Telah Ditangani)	80%	1.665,094.000	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Palangka Raya	Potensi Terjadinya Konflik Terkait Ipoleksosbud Yang Telah Ditangani (Persentase Kasus Yang Telah Ditangani)	80%	1.665,094.000	IKU
8,01,06,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 dokumen	1.665,094.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 dokumen	1.665,094.000	
8,01,06,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	100.000.000	
8,01,06,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Palangka Raya	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	1 dokumen	117.762.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Palangka Raya	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	1 dokumen	117.762.000	

Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			
8,01.06,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 orang	165.961.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 orang	165.961.000	
8,01.06,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	56 orang	215.047.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	56 orang	215.047.000	
8,01.06,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 laporan	365.533.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 laporan	365.533.000	
8,01.06,1,01,06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	-	700.791.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	-	-	700.791.000	
8,01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Palangka Raya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.687.880.180	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Palangka Raya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.687.880.180	
8,01.01,1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen	250.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen	250.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,01,1,01,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	20.000.000	
8,01,01,1,01,02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	10.000.000	
8,01,01,1,01,03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15.000.000	
8,01,01,1,01,04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	10.000.000	
8,01,01,1,01,05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	15.000.000	
8,01,01,1,01,06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	10.000.000	
8,01,01,1,01,07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	170.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	170.000.000	
8,01,01,1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palangka Raya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.112.306.432	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palangka Raya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.112.306.432	
8,01,01,1,02,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang / bulan	4.936.600.432	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang / bulan	4.936.600.432	
8,01,01,1,02,03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	160.455.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	160.455.800	
8,01,01,1,02,04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	2.500.000	
8,01,01,1,02,05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.014.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.014.200	
8,01,01,1,02,06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	5.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	5.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,01,1,02,07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 laporan	3.736.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 laporan	3.736.000	
8,01,01,1,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	5 dokumen	17.751.600	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	5 dokumen	17.751.600	
8,01,01,1,03,03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palangka Raya	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	17.751.600	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palangka Raya	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	17.751.600	
8,01,01,1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palangka Raya	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	121.165.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palangka Raya	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	121.165.000	
8,01,01,1,05,01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Palangka Raya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	3.960.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Palangka Raya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	3.960.000	
8,01,01,1,05,02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palangka Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	80.705.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palangka Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	80.705.000	
8,01,01,1,05,03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	4.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	4.000.000	
8,01,01,1,05,05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Palangka Raya	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	2.500.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Palangka Raya	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	2.500.000	
8,01,01,1,05,06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Palangka Raya	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	2 orang	20.000.000	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Palangka Raya	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	2 orang	20.000.000	
8,01,01,1,05,07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Palangka Raya	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 laporan	10.000.000	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Palangka Raya	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 laporan	10.000.000	
8,01,01,1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palangka Raya	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor	100%	369.663.880	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palangka Raya	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor	100%	369.663.880	
8,01,01,1,06,01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palangka Raya	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 paket	20.546.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palangka Raya	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 paket	20.546.000	
8,01,01,1,06,02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	31.226.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	31.226.000	
8,01,01,1,06,03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palangka Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	31.131.620	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palangka Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	31.131.620	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,01,1,06,04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dokumen	10.162.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 dokumen	10.162.000	
8,01,01,1,06,05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palangka Raya	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	276.598.260	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palangka Raya	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	276.598.260	
8,01,01,1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Palangka Raya	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	393.504.750	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Palangka Raya	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	393.504.750	
8,01,01,1,07,10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	393.504.750	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	393.504.750	
8,01,01,1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palangka Raya	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	998.976.238	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palangka Raya	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	999.975.238	
8,01,01,1,08,01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1.920.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1.920.000	
8,01,01,1,08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	201.339.538	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	201.339.538	
8,01,01,1,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	796.715.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	796.715.700	
8,01,01,1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palangka Raya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	423.513.280	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palangka Raya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	423.513.280	
8,01,01,1,09,01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	102.360.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	102.360.000	
8,01,01,1,09,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	276.803.280	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	276.803.280	
8,01,01,1,09,10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	20 Unit	24.830.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	20 Unit	24.830.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting								
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif									
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12								
8,01,01,1,09,11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	30 Unit	19.520.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	30 Unit	19.520.000									
TOTAL					17.661.635.580					TOTAL					17.661.635.580				

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT

Tahapan-tahapan dalam penyusunan program dan kegiatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 antara lain dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Daerah, RKPD Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya dapat disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 ini belum ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah kabupaten / kota yang ditujukan langsung kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah (tabel 2.4 terlampir).

Tabel 2.5
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I					
TIDAK ADA USULAN					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berpedoman pada Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas nasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan memperhatikan sinergitas antara program Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah :

- Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
- Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum;
- Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode 2020-2024 disusun sebagai penjabaran Visi Misi, Program Aksi Presiden Ir. H. JOKO WIDODO dan Wakil Presiden KH. MA'RUF AMIN, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan visi pembangunan nasional yaitu mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode 2020-2024 adalah "INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH - TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN".

Tujuan strategis bidang politik dan pemerintahan umum adalah **“Kokohnya Persatuan dan Kesatuan serta Karakter Bangsa melalui pengamalan Nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Kebhinekaan sebagai tatanan serta perilaku hidup berbangsa dan Bernegara”**. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, dengan indikator kinerja utama yaitu jumlah peristiwa konflik sosial.
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas, dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu dan pilkada; dan Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada.

Keterkaitan agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 dengan bidang urusan politik dan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. (Melalui fasilitasi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, fasilitasi politik dalam negeri, dan fasilitasi ormas).
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. (Fasilitasi politik dalam negeri).
3. Melakukan revolusi karakter bangsa. (Bina ideologi, karakter, dan wawasan kebangsaan).
4. Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. (Bina ideologi, karakter, dan wawasan kebangsaan serta Fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, maka Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan :

- a. Terwujudnya pengamalan masyarakat Kalimantan Tengah terhadap Konsensus Nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Terwujudnya stabilitas yang kondusif serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Terwujudnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, agama dan kemasyarakatan di Kalimantan Tengah .
- d. Terwujudnya kehidupan politik masyarakat Kalimantan Tengah yang demokratis, sehat dan santun.

3.2.2 Sasaran :

- a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara;
- b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama dan golongan;
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Ormas guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif;
- d. Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.3 di bawah ini berisi daftar program dan kegiatan prioritas, yaitu Program Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2023.

Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Demokrasi

2. Meningkatkan Pembinaan Ormas, LSM dan OKP
3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila, dan;
4. Meningkatkan Kewaspadaan Dini Di Daerah

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebagaimana telah dipetakan sesuai dengan kebijakan ketentuan rumusan program dan kegiatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021.

Jumlah program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2023 berjumlah 5 program, 5 kegiatan dan 27 sub kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan strategis ini adalah sebesar Rp.16.916.178.650. Nilai Total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.3 (terlampir).

Tabel 3.3
RUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8,01,02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat Yang Mengerti Tentang Wawasan Kebangsaan (Orang)	Palangka Raya	200 orang	2.569.914.900	APBD	IKU	200 orang	2.569.914.900
8,01,02,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Palangka Raya	1 dokumen	2.569.914.900	APBD		1 dokumen	2.569.914.900
8,01,02,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	30.000.000	APBD		1 dokumen	30.662.900
8,01,02,1,01,02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	280.000.000	APBD		1 dokumen	280.000.000
8,01,02,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	100 orang	750.000.000	APBD		100 orang	750.000.000
8,01,02,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	100 orang	1.100.000.000	APBD		100 orang	1.100.000.000
8,01,02,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	4 laporan	250.000.000	APBD		4 laporan	250.000.000
8,01,02,1,01,06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Palangka Raya	1 dokumen	159.914.900	APBD		1 dokumen	159.914.900
8,01,03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka)	Palangka Raya	78,5	7.009.143.400	APBD	IKU	78,75	7.009.143.400
8,01,03,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik,	Palangka Raya	1 dokumen	7.009.143.400	APBD		1 dokumen	7.009.143.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							
8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	283.906.000	APBD		1 dokumen	283.906.000
8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	100 orang	317.100.000	APBD		100 orang	317.100.000
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	100 orang	6.025.178.900	APBD		100 orang	6.025.178.900
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	282.958.500	APBD		4 laporan	282.958.500
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Capaian Pembinaan Terhadap Ormas, Lsm Dan Okp Aktif (Persen)	Palangka Raya	80%	3.263.514.000	APBD		85%	3.263.514.000
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Palangka Raya	1 dokumen	3.263.514.000	APBD		1 dokumen	3.263.514.000
8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	2.765.000.000	APBD		1 dokumen	2.765.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	50 orang	100.000.000	APBD		50 orang	100.000.000
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	50 orang	198.514.000	APBD		50 orang	198.514.000
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	100.000.000	APBD		4 laporan	100.000.000
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Palangka Raya	200 orang	1.662.060.250	APBD	IKU	200 orang	1.662.060.250
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Palangka Raya	1 dokumen	1.662.060.250	APBD		1 dokumen	1.662.060.250
8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	200.000.000	APBD		1 dokumen	200.000.000
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	200 orang	1.192.894.250	APBD		200 orang	1.192.894.250
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	100 orang	100.000.000	APBD		100 orang	100.000.000
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	69.166.000	APBD		4 laporan	69.166.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8,01,06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Potensi Terjadinya Konflik Terkait Ipoleksosbud Yang Telah Ditangani (Persentase Kasus Yang Telah Ditangani)	Palangka Raya	80%	2.411.546.100	APBD	IKU	85%	2.411.546.100
8,01,06,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Palangka Raya	1 dokumen	2.411.546.100	APBD		1 dokumen	2.411.546.100
8,01,06,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
8,01,06,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	117.762.000	APBD		1 dokumen	117.762.000
8,01,06,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	100 orang	465.961.000	APBD		100 orang	465.961.000
8,01,06,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	56 orang	661.499.100	APBD		56 orang	661.499.100
8,01,06,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	365.533.000	APBD		4 laporan	365.533.000
8,01,06,1,01,06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Palangka Raya	4 dokumen	700.791.000	APBD		4 dokumen	700.791.000
TOTAL PAGU INDIKATIF					16.916.178.650			16.916.178.650	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel ini berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran RENSTRA PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Jumlah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang urusan/Program rutin Sekretariat Perangkat Daerah terdiri dari 1 program, 8 kegiatan serta 41 sub kegiatan;
2. Program Prioritas/Program Strategis Urusan Perangkat Daerah terdiri dari 5 program, 5 kegiatan dan 27 sub kegiatan.

Total kebutuhan dan untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 28.309.433.559. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti ditunjukkan pada tabel 4.1 (terlampir).

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01,02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat Yang Mengerti Tentang Wawasan Kebangsaan (Orang)	Palangka Raya	200 orang	2.569.914.900	APBD	IKU	200 orang	2.569.914.900
8.01,02,1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Palangka Raya	1 dokumen	2.569.914.900	APBD		1 dokumen	2.569.914.900
8.01,02,1.01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	30.000.000	APBD		1 dokumen	30.000.000
8.01,02,1.01,02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	280.000.000	APBD		1 dokumen	280.000.000
8.01,02,1.01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	100 orang	750.000.000	APBD		100 orang	750.000.000
8.01,02,1.01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	100 orang	1.100.000.000	APBD		100 orang	1.100.000.000
8.01,02,1.01,05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	4 laporan	250.000.000	APBD		4 laporan	250.000.000
8.01,02,1.01,06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Palangka Raya	1 dokumen	159.914.900	APBD		1 dokumen	159.914.900
8.01,03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka)	Palangka Raya	78,5	7.009.143.400	APBD	IKU	78,75	7.009.143.400
8.01,03,1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik,	Palangka Raya	1 dokumen	7.009.143.400	APBD		1 dokumen	7.009.143.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							
8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	283.906.000	APBD		1 dokumen	283.906.000
8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	100 orang	317.100.000	APBD		100 orang	317.100.000
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	100 orang	6.025.178.900	APBD		100 orang	6.025.178.900
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	282.958.500	APBD		4 laporan	282.958.500
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Capaian Pembinaan Terhadap Ormas, Lsm Dan Okp Aktif (Persen)	Palangka Raya	80%	3.263.514.000	APBD		85%	3.263.514.000
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Palangka Raya	1 dokumen	3.263.514.000	APBD		1 dokumen	3.263.514.000
8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	2.765.000.000	APBD		1 dokumen	2.765.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01,04,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	50 orang	100.000.000	APBD		50 orang	100.000.000
8.01,04,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	50 orang	198.514,000	APBD		50 orang	198.514,000
8.01,04,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	100.000.000	APBD		4 laporan	100.000.000
8.01,05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Palangka Raya	200 orang	1.662.060.250	APBD	IKU	200 orang	1.662.060.250
8.01,05,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Palangka Raya	1 dokumen	1.662.060.250	APBD		1 dokumen	1.662.060.250
8.01,05,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	200.000.000	APBD		1 dokumen	200.000.000
8.01,05,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
8.01,05,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	200 orang	1.192.894.250	APBD		200 orang	1.192.894.250
8.01,05,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	100 orang	100.000.000	APBD		100 orang	100.000.000
8.01,05,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	69.166.000	APBD		4 laporan	69.166.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8,01,06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Potensi Terjadinya Konflik Terkait Ipoleksosbud Yang Telah Ditangani (Persentase Kasus Yang Telah Ditangani)	Palangka Raya	80%	2.411.546.100	APBD	IKU	85%	2.411.546.100
8,01,06,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Palangka Raya	1 dokumen	2.411.546.100	APBD		1 dokumen	2.411.546.100
8,01,06,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
8,01,06,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	117.762.000	APBD		1 dokumen	117.762.000
8,01,06,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	100 orang	465.961.000	APBD		100 orang	465.961.000
8,01,06,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	56 orang	661.499.100	APBD		56 orang	661.499.100
8,01,06,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	365.533.000	APBD		4 laporan	365.533.000
8,01,06,1,01,06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Palangka Raya	4 dokumen	700.791.000	APBD		4 dokumen	700.791.000
8,01,01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palangka Raya	100%	11.393.254.909	APBD		100%	11.393.254.909
8,01,01,1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Palangka Raya	6 dokumen	250.000.000	APBD		6 dokumen	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palangka Raya	2 dokumen	20.000.000	APBD		2 dokumen	20.000.000
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palangka Raya	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	10.000.000
8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palangka Raya	1 dokumen	15.000.000	APBD		1 dokumen	15.000.000
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Palangka Raya	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	10.000.000
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Palangka Raya	1 dokumen	15.000.000	APBD		1 dokumen	15.000.000
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	4 laporan	10.000.000	APBD		4 laporan	10.000.000
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Palangka Raya	4 laporan	170.000.000	APBD		4 laporan	170.000.000
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palangka Raya	100%	5.242.506.432	APBD		100%	5.242.506.432
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	37 orang / bulan	5.066.800.432	APBD		37 orang / bulan	5.066.800.432
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Palangka Raya	12 dokumen	160.455.800	APBD		12 dokumen	160.455.800
8.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Palangka Raya	4 dokumen	2.500.000	APBD		4 dokumen	2.500.000
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	1 Laporan	4.014.200	APBD		1 Laporan	4.014.200
8.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Palangka Raya	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.000.000
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Palangka Raya	12 laporan	3.736.000	APBD		12 laporan	3.736.000
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	Palangka Raya	5 dokumen	17.751.600	APBD		5 dokumen	17.751.600
8.01.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Palangka Raya	4 Laporan	17.751.600	APBD		4 Laporan	17.751.600
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Palangka Raya	100%	121.165.000	APBD		100%	121.165.000
8.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Palangka Raya	1 unit	3.960.000	APBD		1 unit	3.960.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Palangka Raya	1 paket	80.705.000	APBD		1 paket	80.705.000
8.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependidikan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependidikan	Palangka Raya	1 dokumen	4.000.000	APBD		1 dokumen	4.000.000
8.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Palangka Raya	1 dokumen	2.500.000	APBD		1 dokumen	2.500.000
8.01.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	Palangka Raya	2 orang	20.000.000	APBD		2 orang	20.000.000
8.01.01.1.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Palangka Raya	1 laporan	10.000.000	APBD		1 laporan	10.000.000
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor	Palangka Raya	100%	775.480.380	APBD		100%	775.480.380
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Palangka Raya	1 paket	170.546.000	APBD		1 paket	170.546.000
8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palangka Raya	1 paket	31.226.000	APBD		1 paket	31.226.000
8.01.01.1.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palangka Raya	1 paket	31.131.620	APBD		1 paket	31.131.620
8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Palangka Raya	6 dokumen	10.162.000	APBD		6 dokumen	10.162.000
8.01.01.1.06.05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Palangka Raya	12 laporan	532.414.760	APBD		12 laporan	532.414.760
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Palangka Raya	100%	2.662.862.979	APBD		100%	2.662.862.979
8.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Palangka Raya	3 unit	1.248.472.000			5 unit	1.248.472.000
8.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Palangka Raya	164 unit	1.272.640.979	APBD		164 unit	1.272.640.979
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palangka Raya	100%	999.975.238	APBD		100%	999.975.238
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	4 laporan	1.920.000	APBD		4 laporan	1.920.000
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palangka Raya	4 laporan	201.339.538	APBD		4 laporan	201.339.538
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palangka Raya	4 laporan	796.715.700	APBD		4 laporan	796.715.700

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8,01,01,1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palangka Raya	100%	1.323.513.280	APBD		100%	1.323.513.280
8,01,01,1,09,01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palangka Raya	21 Unit	202.360.000	APBD		21 Unit	202.360.000
8,01,01,1,09,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palangka Raya	1 unit	1.076.803.280	APBD		1 unit	1.076.803.280
8,01,01,1,09,10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Palangka Raya	20 Unit	24.830.000	APBD		20 Unit	24.830.000
8,01,01,1,09,11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Palangka Raya	30 Unit	19.520.000	APBD		30 Unit	19.520.000
TOTAL PAGU INDIKATIF					28.309.433.559			28.309.433.559	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat daerah ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2023.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat sasaran. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk proving (membuktikan) kinerja dan untuk improving (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang

terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalisasi pencapaian target tahunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2023.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu meridhai semua langkah kita, Amin.

Palangka Raya, Juli 2022

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680806 198911 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN